

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.

1. *Agency Theory*

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*principal*) yaitu investor dengan manajer (*agent*). Investor memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*). Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi. Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent* (Pratika, 2011).

Scot (2000) dalam Pratika (2011) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara pemilik modal dengan manajer perusahaan dimana antara *principal* dan manajer ingin memaksimalkan *utility* masing-masing dengan informasi yang diinjak

Menurut (Sutedi, 2011:13) tentang teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi:

a. Asumsi tentang sifat manusia

Menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

b. Asumsi tentang keorganisasian

Adanya konflik antara anggota organisasi, efisisensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.

c. Asumsi informasi

Informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Penerapan manajemen risiko secara formal dan terstruktur merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. Apabila dilaksanakan secara efektif, manajemen risiko diharapkan dapat menjadi sebuah kekuatan bagi pelaksanaan GCG dalam perusahaan.

2. *Signalling Theory*

Salah satu teori yang melatarbelakangi masalah asimetri informasi adalah *signalling theory*. Secara umum, perusahaan menggunakan *signalling theory* untuk mengungkapkan pelaksanaan GCG agar dapat menciptakan reputasi yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Andarini dan Januarti, 2010).

Salah satu sinyal yang diberikan perusahaan dalam pelaksanaan GCG adalah penerapan manajemen risiko dan dalam laporan keuangan. Hal

ini memberikan informasi bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan lain karena telah menerapkan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi (Meizaroh dan Lucyanda, 2011).

3. Komisaris Independen

Task Force Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* menyebutkan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendalian, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Pratika, 2011).

Di dalam suatu perseroan atau perusahaan, diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen, yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afliasinya. Komisaris independen ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan pihak, seperti pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik (Santosa, 2008).

Independensi bagi komisaris merupakan hal yang diharuskan dalam suatu perusahaan publik agar komisaris dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Agar suatu perusahaan menjadi efektif dalam melaksanakan tugasnya maka jumlah komisaris independen dalam perusahaan harus ditingkatkan. Definisi mengenai independensi di sini adalah dimana

komisaris tidak memiliki hubungan dengan para pegawai yang terlebih dahulu bekerja di perusahaan tersebut, bebas dari hubungan kontraktual yang menguntungkan dan bebas dari hubungan keluarga yang dianggap dapat memengaruhi independensinya (Greenwood, 2004:839 dalam Santosa, 2008).

Komisaris independen dapat mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan tindakan manajer serta pemilik perusahaan yang menyimpang dari kontrak kerja yang sudah disetujui antara *principal* dan *agent*. Komisaris merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang GCG (Ujithanto, 2007 dalam Pratika, 2011).

4. Ukuran dewan komisaris

Pfefer & Salancik (1978) dalam Pratika (2011) menyatakan bahwa jumlah dewan yang besar dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Keuntungan dari jumlah dewan yang besar dalam suatu perusahaan salah satunya yaitu perusahaan tergantung pada dewan untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Semakin besar kebutuhan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.

Dewan komisaris berperan untuk mengawasi penerapan manajemen risiko dan memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif. Ukuran yang besar dapat mengurangi pengaruh manajer sehingga dewan dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif (Zahra dan Pearce, 1989 dalam Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Selain itu, Jensen dan Meckling (1976) dalam Hikmah dkk (2011) menyatakan bahwa dewan komisaris

dibutuhkan untuk *memonitoring* dan mengendalikan tindakan manajemen karena perilaku oportunistanya.

5. Keberadaan *Risk Management Committee* (RMC)

Subramaniam *et al.* (2009) dalam Restuningdiah (2011) menyatakan bahwa RMC merupakan mekanisme pengawasan risiko yang penting bagi perusahaan. Secara umum, tugas dan wewenang RMC adalah: mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi, mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi, menaksir pelaporan keuangan organisasi, memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pembentukannya, RMC dapat tergabung dengan audit atau dapat pula menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri.

Komite terpisah yang secara khusus berfokus pada masalah risiko (RMC), dinilai dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam tugas pengawasan risiko dan manajemen pengendalian internal. RMC yang terpisah dari audit akan lebih mencurahkan banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan secara luas dan mengevaluasi pengendalian yang terkait secara menyeluruh.

6. Reputasi auditor

Praptitorini dan Januarti (2007) dalam Pratika (2011) menyatakan bahwa reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang auditor tersebut. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self interest*, maka kehadiran pihak ketiga yang

independen sebagai mediator pada hubungan antara *principal* dengan *agent* sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Investor akan lebih cenderung pada data akuntansi yang dihasilkan oleh auditor yang bereputasi.

Dalam penelitian ini menggunakan *big four* sebagai proksi dari reputasi auditor karena *big four* dipandang memiliki reputasi dan keahlian yang baik untuk mengidentifikasi risiko perusahaan yang mungkin terjadi (Meizaroh dan Lucyanda, 2011).

7. *Leverage*

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang atau kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dalam sebuah perusahaan (Supriyanti dan Rolinda, 2007 dalam Pratika, 2011). *Leverage* mengacu pada seberapa jauh suatu perusahaan bergantung pada kreditor dalam membiayai aktiva perusahaan (Hilmi dan Ali, 2008 dalam Pratika, 2011).

Mursalim (2010) menyatakan bahwa pembiayaan perusahaan untuk menambah modal baru melalui utang membuat manajer harus lebih berhati-hati dalam mengelola utang, karena adanya beban bunga tetap yang harus dibayar selain pokok pinjaman. Sedangkan, Jensen dan Meckling (1976) dalam Mursalim (2010) mengemukakan bahwa menggunakan utang dapat mengurangi kebutuhan terhadap saham dari luar (*outside stock*) dan membantu mengurangi *agency problem*.

8. Konsentrasi kepemilikan

Isnanta (2008) dalam Panggabean (2011) masalah tata kelola perusahaan merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut antara lain karena karakteristik kepemilikan dalam perusahaan, yaitu:

a. Kepemilikan terkonsentrasi (*closely held*)

Keadaan dimana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan.

b. Kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*)

Apabila kepemilikan saham secara relatif merata ke publik tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar.

Struktur kepemilikan saham menunjukkan bagaimana distribusi kekuasaan dan pengaruh pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Kepemilikan saham terkonsentrasi adalah keadaan dimana sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan. Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas *monitoring*. Karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasi yang dimiliki manajemen (Ningsentiti, 2010)

9. Manajemen risiko

Manajemen risiko merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses manajemen, di dalamnya terdapat suatu strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola semua risiko dalam perusahaan. *The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (2004) mengemukakan bahwa manajemen risiko perusahaan merupakan suatu proses yang melibatkan dewan direksi, manajemen dan karyawan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat memengaruhi perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan.

Pratika (2011) menyatakan bahwa kondisi dunia usaha selalu penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut menimbulkan risiko usaha yang dihadapi oleh perusahaan. Manajemen tidak bisa menghindari adanya risiko usaha. Sehubungan dengan itu, maka perusahaan berinisiatif untuk mengelola risiko tersebut dengan cara menerapkan manajemen risiko dalam perusahaan.

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memelihara efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis.

1. Komisaris independen dan pengungkapan manajemen risiko

Badan Pengawasan Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah mensyaratkan keberadaan komisaris independen pada seluruh perusahaan publik. Keputusan Menteri BUMN No 117/2002 tentang penerapan *good corporate governance* pada BUMN mensyaratkan hal yang sama untuk BUMN (Prasetyo, 2011).

Penelitian yang dilakukan Kleffner *et al.* (2003) dan Beasley *et al.* (2005) dalam Meizaroh dan Lucyanda (2011) menunjukkan bahwa kehadiran komisaris independen meningkatkan kualitas pengawasan atas implementasi manajemen risiko dan kualitas audit sehingga dapat mengurangi kecurangan dan perilaku oportunistik manajer. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan sangatlah penting. Dengan menambah proporsi komisaris independen, maka perusahaan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap direksi dan manajemen risiko (Pratika, 2011).

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meizaroh dan Lucyanda (2011) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada pengungkapan manajemen risiko. Hal ini disebabkan karena kualitas fungsi pengawasan bukan ditentukan oleh tingkat independensi, tapi lebih ditentukan oleh kualitas dan latar belakang

Apabila perusahaan memiliki jumlah komisaris independen yang tinggi, maka akan lebih memerhatikan manajemen risiko pada perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan komisaris independen tidak terafiliasi oleh pihak internal perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H₁: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

2. Ukuran dewan komisaris dan pengungkapan manajemen risiko

Dewan yang memiliki jumlah anggota yang besar memiliki peluang yang lebih baik untuk memilih direktur dengan kemampuan yang kompeten untuk mengatur komite-komite yang dibawahinya termasuk terhadap manajemen risiko (Pratika, 2011). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Desender, 2007) yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan yang besar menambah peluang untuk saling bertukar informasi dan keahlian sehingga meningkatkan kualitas manajemen risiko.

Akan tetapi, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meizaroh dan Lucyanda (2011) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen risiko. Hal ini disebabkan karena semakin besar ukuran dewan maka peluang terjadinya konflik internal juga semakin besar, sehingga menyebabkan anggota dewan

.....

Suatu perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris yang besar memiliki peluang yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko. Hal ini dikarenakan jumlah anggota dewan yang besar dapat menambah peluang untuk saling bertukar informasi dan keahlian dalam mengendalikan manajemen risiko. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H₂: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

3. Keberadaan *risk management committee* dan pengungkapan manajemen risiko

Penelitian yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010) menunjukkan bahwa dalam pembentukannya RMC dapat tergabung dengan komite audit atau menjadi komite terpisah dan berdiri sendiri yang khusus berfokus pada masalah risiko. Perusahaan yang memiliki RMC dapat lebih banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk mengevaluasi pengendalian internal dan menyelesaikan berbagai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan.

RMC juga lebih memungkinkan dewan komisaris untuk memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam (Bates dan Leclerc, 2009 dalam Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meizaroh dan Lucyanda (2011) yang menunjukkan bahwa keberadaan RMC berpengaruh pada manajemen risiko. Perusahaan yang memiliki RMC dapat lebih banyak mencurahkan waktu

tenaga, dan kemampuan untuk mengevaluasi seluruh pengendalian internal dan menangani risiko yang mungkin terjadi.

Suatu organisasi yang memiliki RMC dapat lebih cenderung mencurahkan waktu dan kemampuannya untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan menyelesaikan berbagai risiko yang kian meningkat dalam suatu organisasi. Karena RMC memiliki tugas untuk mempertimbangkan strategi dan mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H₃: Keberadaan *risk management committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

4. Reputasi auditor dan pengungkapan manajemen risiko

Saat ini auditor menjadi faktor utama pengawasan organisasi dan berperan penting bagi manajemen risiko. Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan dari *big four* audit tentang kualitas *monitoring* internal yang terdapat pada klien *big four* audit jika dibandingkan dengan kualitas *monitoring* internal dari *non big four* audit. Penelitian terdahulu menemukan hubungan positif antara perusahaan audit, *big four* dan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi (Cohen *et al.*, 2004 dalam Pratika, 2011). Selain itu, terdapat tekanan yang lebih besar pada perusahaan yang diaudit *big four* untuk menerapkan dan mengungkapkan manajemen risiko (Chen *et al.*, 2009 dalam Meizarak dan Luwanda, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Pratika

(2011) menunjukkan bahwa *big four* akan memberikan panduan kepada kliennya mengenai praktik GCG, khususnya mengenai manajemen risiko.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meizaroh dan Lucyanda (2011) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh pada pengungkapan manajemen risiko. Alasan yang mendasari adalah *big four* biasanya membantu internal auditor dalam mengevaluasi dan menilai keefektifan manajemen risiko. Hal ini karena *big four* dianggap memiliki keahlian untuk mengidentifikasi risiko. Sehingga, meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko perusahaan.

Dengan adanya *big four* dalam suatu perusahaan dapat membantu pihak internal auditor dalam mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko, sehingga kualitas penilaian dan pengawasan risiko pada perusahaan tersebut akan meningkat. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H₄: Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

5. *Leverage* dan pengungkapan manajemen risiko

Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi cenderung memiliki perjanjian utang dan risiko yang lebih tinggi. Peminjam menuntut pihak manajer untuk menerapkan pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang efektif (Pratika, 2011).

Selain itu, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung memiliki biaya agensi yang tinggi sehingga dapat menimbulkan tingginya

risiko keuangan yang harus dihadapi. Perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung untuk memiliki risiko *going concern* yang tinggi, terkait dengan fungsi pengawasan. Kreditor sebagai pihak pemberi hutang cenderung menuntut perusahaan untuk memiliki pengendalian internal yang lebih baik. Konsekuensinya, perusahaan dengan *leverage* tinggi akan memiliki tuntutan kuat untuk membentuk manajemen risiko (Subramaniam *et al.*, 2009 dalam Andarini dan Januarti, 2010).

Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andarini dan Januarti (2010) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berhubungan secara signifikan dengan manajemen risiko. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan hutang tinggi cenderung hati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Semakin tinggi proporsi hutang yang harus ditanggung, maka semakin tinggi pula perusahaan berusaha mengurangi aktivitas yang sifatnya tidak optimal.

Meningkatnya total utang dalam suatu perusahaan, menuntut pihak internal untuk lebih meningkatkan manajemen risiko untuk mengantisipasi beberapa risiko yang akan terjadi. Hal ini dikarenakan pihak kreditor lebih mempertimbangkan besar kecilnya manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan dalam memberikan pinjaman. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H₁: *Leverage* berpengaruh positif terhadap kemampuan manajemen risiko

6. Konsentrasi kepemilikan dan pengungkapan manajemen risiko

Hasil penelitian Claessens *et al.* (2000) dalam Wawo (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan di Asia Timur termasuk Indonesia ditemukan cenderung terkonsentrasi. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wawo (2010) yang menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan sensitif dalam pengujian pada pisah batas konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan hanya berpengaruh sampai pada tingkat 30%.

Sedangkan, penelitian Desender (2007) menemukan bahwa pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas memiliki preferensi yang kuat untuk mengendalikan manajemen, mengurangi biaya agensi, dan meningkatkan peran pengawasan pada perusahaan tempat mereka berinvestasi.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meizaroh dan Lucyanda (2011) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap manajemen risiko. Perusahaan dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi memiliki tingkat pengungkapan manajemen risiko yang lebih tinggi. Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan maka semakin kuat tuntutan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi seperti risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko adalah dengan memastikan adanya satu pemegang saham yang terbesar dalam

suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham bisa mengendalikan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H₆: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko

C. Model Penelitian

